

Strategi, Taktik dan Bentuk Perlawanan Aceh terhadap Kolonial dalam Perang Aceh 1873-1912

Fajrinnisa Dhiya' Faatina

UIN Sunan Ampel Surabaya

ddhiyaf@gmail.com

Imam Ibnu Hajar

UIN Sunan Ampel Suruabaya

ibnuhajar@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas peristiwa Perang Aceh yang menjadi salah satu sejarah panjang perang Islam di Indonesia yang dipicu dengan kedatangan Belanda ke tanah Aceh serta ambisinya untuk mengakuisisi wilayah Aceh yang tertulis pada Traktat Sumatera tahun 1871 M. Fokus isu yang dibahas pada penelitian ini ialah: Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Aceh; Bagaimana strategi dan taktik perlawanan rakyat Aceh; Serta siapa tokoh-tokoh penting yang berperan dalam perjuangan tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang berbagai upaya dan strategi bentuk perlawanan yang digunakan masyarakat Aceh untuk mempertahankan kedaulatan politik dan nilai-nilai keislaman di tanah mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan historiografis serta metode *Library Research* (Studi Pustaka) dengan memanfaatkan sumber sekunder berupa buku sejarah dan jurnal ilmiah, dengan analisis data deskriptif-analitis. Hasil studi menunjukkan bahwa pemicu intervensi kolonial ini semakin membangkitkan tekad rakyat Aceh untuk mempertahankan kedaulatan politik dan nilai-nilai keislaman mereka. Strategi perlawanan yang diterapkan, yang sangat dipengaruhi dan dikoordinasikan oleh para ulama dan tokoh yang lainnya, mencerminkan perpaduan semangat jihad dan perjuangan nasional, yang menjadi kunci atas lamanya durasi perang ini.

Kata kunci: *Perang Aceh, Kolonial, Strategi, Perlawanan*

PENDAHULUAN

Perang Aceh merupakan salah satu episode penting dalam sejarah perlawanan umat Islam di Nusantara terhadap kolonialisme Barat. Konflik ini tidak dapat dipisahkan dari eksistensi Kesultanan Aceh Darussalam, sebuah kerajaan Islam yang memiliki posisi strategis di ujung utara Pulau Sumatera. Kesultanan Aceh bukan hanya dikenal sebagai pusat kekuasaan politik, tetapi juga sebagai pusat keilmuan dan dakwah Islam yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Perang yang terjadi antara tahun 1873 M hingga awal abad ke-20 ini merupakan puncak dari ketegangan panjang antara kepentingan kolonial Belanda dan masyarakat Aceh yang mempertahankan kedaulatan politik dan

nilai-nilai keislaman. Kesultanan Aceh mencapai masa kejayaannya pada pertengahan abad ke-16 hingga awal abad ke-17 di bawah kepemimpinan sultan-sultan besar seperti Sultan Iskandar Muda (1607–1636 M). Dalam periode tersebut, Aceh berhasil memperluas wilayah kekuasaannya melalui ekspansi ke kerajaan-kerajaan tetangga, seperti Pasai (1524), Pidie (1521), dan Daya (1520). (Hadi, 2010) Ekspansi ini tidak hanya menunjukkan kekuatan militer Aceh, tetapi juga menggambarkan peran pentingnya dalam menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam di wilayah barat Nusantara. Posisi strategis Aceh di jalur perdagangan internasional turut memperkuat peran geopolitiknya, menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu kekuatan Islam terbesar di kawasan tersebut.

Memasuki abad ke-19, posisi Kesultanan Aceh mulai mengalami tantangan internal dan eksternal yang kompleks. Meskipun tetap mempertahankan identitasnya sebagai kerajaan Islam yang kuat, Aceh mulai menghadapi tekanan dari perubahan geopolitik regional dan global. Di sisi internal, dinamika politik dalam istana dan persaingan antarkelompok elite menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Di sisi eksternal, meningkatnya ekspansi kolonial Belanda di Sumatera serta keterlibatan kekuatan asing lainnya seperti Inggris dan Amerika Serikat dalam urusan perdagangan dan diplomasi turut memperlemah posisi tawar Aceh di panggung internasional. Pada masa ini Aceh masih menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Selat Malaka, terutama dalam ekspor hasil bumi seperti lada dan kapur barus.

Kajian mengenai strategi perang yang digunakan Belanda dalam upaya menaklukkan Aceh telah menjadi fokus perhatian berbagai penelitian sejarah. Salah satu tinjauan akademis yang relevan dilakukan oleh Sotardodo Siahaan, Afrizal Hendra, dan I Wayan Midhio (2021). Dalam artikel mereka, penulis berargumen bahwa Perang Aceh (1873-1912 M) merupakan konflik terpanjang yang dihadapi oleh Belanda, dan dapat dikategorikan sebagai Perang Semesta. Karakteristik perang semesta ini terlihat dari mobilisasi dan keterlibatan total seluruh kekuatan dan potensi yang dimiliki masyarakat Aceh. (Siahaan et al., 2021) Secara paralel, penelitian terdahulu juga menyoroti dimensi ideologis dan kepemimpinan dalam perlawanan Aceh. Setiap masyarakatnya memiliki peran penting dalam perjuangan melawan Belanda. Peran sentral dipegang oleh para ulama, yang tidak hanya bertindak sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai figur yang sanggup memimpin dan mengarahkan masyarakat. Para ulama secara efektif mendoktrin pola pikir masyarakat (*mindset*) dengan ideologi Perang Sabil (*jihad fi sabilillah*) atau Perang di Jalan Allah. Melalui seruan ini, rakyat termotivasi untuk berjihad mempertahankan hak hak bernegara dan beragama meraka. Lebih lanjut, di medan tempur, para ulama pun dipercaya untuk memegang komando dan menjadi pemimpin langsung pasukan perang melawan kolonial. (Midadi, 2025)

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, penelitian merumuskan beberapa pertanyaan pokok sebagai fokus kajian, yaitu: (1) Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Perang Aceh antara rakyat Aceh dan pemerintah kolonial Belanda? (2) Bagaimana bentuk strategi dan taktik perlawanan yang digunakan oleh rakyat Aceh dalam menghadapi kekuatan militer kolonial? (3) Siapa saja tokoh-tokoh penting yang berperan dalam memimpin dan menggerakkan perlawanan rakyat Aceh

terhadap kolonial Belanda. Guna menjawab rumusan masalah mengenai latar belakang, strategi, dan peran tokoh dalam Perang Aceh, penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan kualitatif serta berfkarena peneliti berupaya melakukan pemahaman mendalam (*verstehen*) terhadap kontokus pada Studi Pustaka (*Library Research*). Pendekatan ini dipilih eks historis, sosial, dan ideologis perlawanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan inventarisasi sumber sekunder, seperti buku sejarah, jurnal ilmiah, manuskrip, arsip kolonial, dan catatan sejarawan kontemporer. Selanjutnya, analisis data mengikuti tahapan metodologi sejarah: Kritik Sumber (verifikasi) untuk memastikan keotentikan dan kredibilitas data; Interpretasi untuk mengungkap makna, pola pikir, dan nilai-nilai yang terkandung dalam perlawanan; dan diakhiri dengan Historiografi (penulisan sejarah) secara deskriptif-analitis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang komprehensif dan interpretatif mengenai dinamika Perang Aceh sebagai bagian integral dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Faktor Timbulnya Perang Aceh

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pecahnya Perang Aceh (1873-1912) bersifat sangat kompleks, mencakup dinamika perjanjian internasional, ambisi kolonial Belanda yang tak terbandung, serta kepentingan geopolitik di jalur maritim strategis. Perang ini bukan hanya konflik antara dua kekuatan lokal, melainkan puncak dari perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Awal mula ketegangan diplomatik yang melibatkan Aceh terletak pada perjanjian yang ditandatangani oleh dua kekuatan kolonial besar, Inggris dan Belanda.

a) Treaty of London 1824

Dimulai ketika Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian dimana mereka saling menyerahkan wilayah kekuasaannya satu sama lain. Inggris menyerahkan Bengkulu dan seluruh kekuasaannya di Sumatera, sedangkan Belanda menyerahkan tanah Malaka kepada Inggris.(Ningsih & Nailufar, 2021) Perjanjian tersebut dinamakan *Treaty of London* atau Traktat London 1824 M. Bagian terpenting dari perjanjian ini bagi Aceh adalah klausul yang menjamin dan menghormati kedaulatan Aceh. Kedua belah pihak bersepakat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Aceh dan membiarkannya berdiri sebagai negara merdeka. Klausul ini berfungsi sebagai "zona penyangga" bagi Aceh selama beberapa dekade.

b) Treaty Soematra

Meskipun terikat Traktat London 1824 M, Belanda mulai menunjukkan ambisi yang melanggar batasan tersebut. Belanda secara bertahap menyerang dan menguasai wilayah-wilayah yang secara tradisional berada di bawah pengaruh atau kedaulatan Aceh, seperti daerah Barus dan Singkil di pantai barat Sumatera. Tindakan-tindakan ini merupakan sinyal awal bahwa Belanda bertekad untuk

mewujudkan kendali penuh atas seluruh pulau Sumatera. Titik balik yang langsung memicu Perang Aceh adalah penandatanganan Traktat Sumatera (Sumatera Tract) pada tahun 1871 M. Dalam perjanjian ini, Belanda berhasil meyakinkan Inggris untuk mencabut klausul kedaulatan Aceh yang ada di Traktat London 1824 M. Sebagai imbalan, Inggris diizinkan memperluas pengaruhnya di bagian lain dunia, sementara Belanda memperoleh 'tangan bebas' (*vrije hand*) untuk memperluas kekuasaannya di seluruh Sumatera. Dengan dibatalkannya klausul ini, Belanda secara diplomatik telah menghilangkan satu-satunya hambatan internasional untuk menyerang dan menaklukkan Aceh. (Alfian, n.d., p. 63)

Dengan landasan traktat ini, langkah strategis Belanda berikutnya adalah memaksakan kehendaknya agar Kesultanan Aceh Darussalam yang berdaulat, yang saat itu merupakan salah satu kekuatan utama di kawasan, mengakui otoritas dan kekuasaan kolonial Belanda. Belanda melihat Aceh sebagai hambatan terakhir untuk menguasai jalur pelayaran strategis dan mengintegrasikan seluruh Sumatera ke dalam Hindia Belanda. Namun, upaya diplomasi dan penekanan tersebut justru mendapat penolakan yang sangat keras dan tegas dari pihak Aceh. Kesultanan Aceh, yang memiliki tradisi kemerdekaan yang kuat dan didukung oleh ulama serta rakyatnya, sama sekali tidak berniat untuk tunduk di bawah kendali asing. Penolakan ini memicu ketegangan yang semakin memuncak dan tidak dapat ditoleransi oleh Belanda. Situasi ini secara resmi membawa Belanda untuk mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Aceh. Deklarasi bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 26 Maret 1873 M, menandai dimulainya Perang Aceh yang terkenal panjang, berdarah, dan menjadi salah satu konflik kolonial terberat bagi Belanda. (Hadi, 2010, p. 196)

Strategi, Taktik dan Bentuk Perlawanan Aceh

Konflik bersenjata antara Kesultanan Aceh Darussalam dan Pemerintah Kolonial Belanda, yang dimulai sejak tahun 1873 M, memiliki pemaknaan yang fundamental berbeda bagi kedua belah pihak. Bagi Aceh, sebagai entitas politik dan keagamaan yang berlandaskan kedaulatan Islam, peperangan ini dimaknai sebagai perang agama dimana setiap bentuk perjuangannya selalu di landasi oleh agama. (Hajar et al., 2025, p. 385) Dengan kata lain perang ini dapat disebut sebagai Jihad, sebuah perjuangan suci yang melampaui kepentingan politik dan militer konvensional. Dalam kerangka pandang Aceh, Jihad dipahami sebagai upaya mendasar untuk mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan membela kemerdekaan rakyat dari intervensi serta penguasaan pihak non-Muslim (Belanda). Interpretasi ini menjadikan perjuangan Aceh memiliki dimensi teologis, spiritual, dan politis sekaligus. Pemaknaan suci inilah yang melahirkan beragam terminologi lokal yang populer untuk menyebut konflik tersebut, yang semuanya mencerminkan sifat dan motivasi perlawanan yang mendalam, yakni, Perang Sabi (Perang di Jalan Allah), Perang *Kaphee* (Perang melawan orang kafir), Perang Beulanda, serta Perang Gompeuni. Dengan melihat Kedaulatan Islam yang kental, peranan ulama tentu menjadi pilar sentral yang sangat menentukan keberlangsungan perlawanan. Ulama

bertindak sebagai pemimpin ideologis, spiritual, dan terkadang militer di lapangan, memberikan legitimasi moral dan teologis yang dibutuhkan. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa jihad yang mewajibkan umat Muslim untuk melawan Belanda, menjadikan perlawanan sebagai kewajiban agama. (Hadi, 2010, p. 198)

Menurut Ibrahim Alfian dalam karyanya, *Perang di Jalan Allah*, periode konflik bersenjata di Aceh terbagi menjadi dua fase utama: Masa Bertahan (1873-1875 M) dan Masa Perang Rakyat (1876-1896 M). Fase pertama, Masa Bertahan, ditandai dengan serangkaian agresi militer yang dilancarkan oleh pihak Belanda. Di agresi pertama, Belanda mengalami kekalahan yang signifikan dalam melawan Aceh. Merespons kekalahan tersebut, pada agresi kedua, Belanda menerapkan strategi blokade maritim di sepanjang pantai Aceh untuk memutuskan jalur komunikasi dan interaksi Aceh dengan pihak luar. Pada titik ini Belanda kemudian memulai agresi keduanya dan mulai menyerang *dalem* (Kediaman Sultan). Ketika dalem sedang diperjuangkan, sayangnya penyakit kolera sedang menyebar luas. Banyak korban berjatuhan akibat terjangkit penyakit ini. Selain itu buruknya komunikasi antar pasukan Aceh menyebabkan dalem berhasil dikuasai oleh Belanda. Setelah sukses menguasai Dalem, Belanda secara keliru mengasumsikan bahwa mereka telah menguasai pusat kekuasaan Aceh secara de facto. Berlandaskan asumsi ini, Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum kepada wilayah-wilayah di luar Aceh agar mengakui kedaulatan mereka, mengancam akan menggunakan kekerasan militer apabila tawaran damai tersebut ditolak. Namun, strategi hegemoni ini tidak efektif; alih-alih menundukkan, tindakan Belanda tersebut justru memicu dan mengobarkan semangat jihad serta perlawanan rakyat Aceh secara lebih masif. (Alfian, n.d., pp. 66–70)

Kemudian di fase kedua, Masa Perang Rakyat, sebuah istilah yang menggambarkan keterlibatan luas seluruh lapisan masyarakat Aceh dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Menurut pemikiran Michael Walzer, dalam konteks perang seperti ini, satu-satunya pihak yang dapat disebut sebagai tentara adalah pihak penjajah, sedangkan rakyat yang berjuang di pihak Aceh sebenarnya sedang berupaya untuk mempertahankan diri dan tanah air mereka dari penindasan. Konsep ini terlihat jelas dalam dinamika pertempuran di lapangan. Pasukan perang Aceh tidak beroperasi di bawah satu komando terpusat, melainkan tersebar di berbagai wilayah dengan struktur kepemimpinan yang bersifat lokal dan otonom. Para pemimpin lokal tersebut terdiri dari tokoh-tokoh tradisional, bangsawan daerah, serta para ulama yang memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat. Mereka berperan penting dalam menggerakkan rakyat untuk ikut serta dalam perlawanan, baik secara langsung di medan tempur maupun melalui dukungan logistik dan moral. Taktik perang yang diterapkan pun bersifat gerilya dan desentralistik, di mana serangan dilakukan secara sporadis, cepat, dan terencana oleh kelompok-kelompok kecil di berbagai daerah. Pendekatan ini membuat pasukan Belanda kesulitan dalam menghadapi perlawanan Aceh karena mereka tidak dapat menentukan pusat kekuatan lawan secara pasti. Akibatnya, strategi ini menimbulkan masalah besar bagi pasukan kolonial, baik dari segi logistik, komunikasi, maupun moral. Dengan

demikian, perang Aceh tidak hanya menjadi simbol perlawanan bersenjata, tetapi juga mencerminkan semangat kolektif rakyat dalam mempertahankan kedaulatan dan identitas bangsa mereka. (Hadi, 2010, p. 205)

Sebagai kawasan berkedaulatan islam, tentu saja ulama memiliki pengaruh yang besar dan kuat dalam pergerakan perjuangan masyarakat Aceh seperti yang telah di singgung. Para ulama bertanggung jawab dalam memobilisasi massa dan mengorganisasi basis perlawanan di wilayah pedalaman. Untuk mengobarkan semangat perjuangan, mereka memanfaatkan syair-syair yang kemudian dikumpulkan menjadi sebuah Hikayat. Pada masa ini muncul sebuah Hikayat Perang Sabi yang berisikan seruan semangat untuk Jihad dalam membela agama dan negara. Secara umum, Hikayat ini memiliki fungsi krusial dalam mobilisasi spiritual dan psikologis para pejuang. Sebelum memasuki medan pertempuran (saat keberangkatan atau di *meunasah* terdekat), Hikayat Prang Sabi ini akan dibacakan secara khidmat oleh ulama atau orang yang ditunjuk. Pembacaan ini bertujuan untuk mengobarkan semangat juang dan menanamkan keyakinan bahwa kematian dalam pertempuran melawan *kaphee* (istilah Aceh untuk merujuk pada non-Muslim, yakni Belanda) akan dihitung sebagai *syahid* (gugur di jalan Allah). Keyakinan ini memberikan dorongan fanatisme yang luar biasa, mengubah ketakutan akan kematian menjadi aspirasi untuk mencapai kemuliaan spiritual . Efeknya adalah peningkatan moral yang signifikan, membuat para pejuang siap berkorban demi agama dan tanah air. (Siahaan et al., 2021, p. 2543)

Selain peran utamanya di kalangan pejuang dewasa, Hikayat Prang Sabi juga memainkan peran penting dalam pendidikan dan indoktrinasi di tingkat rumah tangga dan komunitas. Masyarakat Aceh menerapkan tradisi penyampaian semangat perjuangan sejak dini, bahkan kepada anak-anak mereka. Salah satu praktik yang umum adalah menyenandungkan atau menceritakan bagian-bagian dari Hikayat Prang Sabi sebagai pengantar tidur kepada anak-anak. Praktik ini merupakan bentuk internalisasi nilai-nilai perlawanan dan Jihad sejak usia dini. (Siahaan et al., 2021, p. 2543) Salah satu bait yang menyerukan semangat perjuangan sebagai berikut :

*Soe yang na jok nyawong hareuta,
Geupu beulanja bak Prang Sabi.
Neubloe le Po meuhai hareuge,
Deungon syeuruga neutuka sabe.
Nyankeuh keu yum neubri le Allah,
Badai peunayah yoh di sini.
Meunan janji Poteu Allah,
He meutuah bek le lanti.*

Artinya :

Siapa yang menyerahkan nyawa dan harta,
Dibelanjakannya untuk Perang Sabil (Jihad),
Dibeli oleh Tuhan dengan harga yang mahal,
Ditukar dengan surga selamanya.

Itulah harga yang diberikan oleh Allah,
Sebagai ganti penderitaan yang ada di sini (dunia).
Begitulah janji Poteu Allah (Tuhan Allah),
Hai yang berbahagia, jangan lagi menunda-nunda. (Kulu, 1983)

Tokoh-Tokoh Perjuangan

Sebagai konflik kolonial terpanjang yang tercatat dalam sejarah Nusantara, Perang Aceh (1873-1912 M) secara alami memunculkan regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan dalam mengomandoi kekuatan perlawanan rakyat. Kegigihan perlawanan Aceh, yang didorong oleh semangat perang sabil (*jihad*), memerlukan suksesi pemimpin militer dan spiritual yang karismatik untuk menjaga moral dan taktik gerilya. Berikut adalah figur-figur kunci yang memainkan peran penting dalam mengarahkan perlawanan Aceh melawan agresi Belanda :

a. Teungku Chik Di Tiro

Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman atau yang lebih dikenal sebagai Teungku Chik di Tiro, beliau lahir 1 Januari 1836 M. Beliau merupakan figur sentral dan krusial dalam dinamika Perang Aceh, khususnya pada periode 1881–1891 M, ketika perlawanan rakyat mulai melemah pasca jatuhnya kraton dan Masjid Raya. Beliau dipercaya untuk memimpin peperangan di Aceh Besar dan mampu menghimpun kekuatan pasukan yang signifikan, mencapai hingga 6.000 orang. Pengaruh spiritual dan militernya yang kuat memastikan bahwa semangat pasukan beliau tidak pernah pupus dalam menghadapi Belanda. Keluarga ulama Tiro, di bawah kepemimpinan beliau, diakui sebagai keluarga Aceh yang paling besar pengaruhnya dalam Perang Aceh dan yang secara gigih meneruskan perjuangan hingga titik darah penghabisan. Besarnya pengaruh ini terkonfirmasi dari fakta bahwa Belanda terpaksa menggunakan siasat kotor berupa peracunan untuk melenyapkan beliau pada 25 Januari 1891 M, karena jiwa Perang Sabil terdapat pada dirinya. Bahkan setelah wafat, perjuangannya diteruskan oleh anak-anaknya, mengukuhkan keluarga ini sebagai sasaran utama operasi militer Belanda dan sumber inspirasi kepahlawanan dalam sejarah konflik tersebut. (Ridhwan & Ibrahim, 2022)

b. Teuku Umar

Teuku Umar, lahir pada tahun 1854 M, beliau merupakan figur strategis dan taktis dalam dinamika Perang Aceh yang berlangsung antara tahun 1873 M hingga 1899 M. Peran sentral Teuku Umar terletak pada strategi "berpura-pura bekerjasama" dengan pihak kolonial Belanda, yang secara efektif menjadi taktik cerdik untuk melakukan infiltrasi logistik. Melalui siasat ini, Teuku Umar berhasil mengakuisisi sejumlah besar senjata dan uang dari Belanda, yang kemudian digunakan untuk memobilisasi dan mempersenjatai perlawanan rakyat Aceh. Kontribusi militernya yang signifikan dalam melawan penjajahan menjadikan beliau diakui sebagai salah satu pahlawan pencetus Perang Aceh. Secara historiografi, pengaruh Teuku Umar diabadikan sebagai warisan kolektif, terbukti

dari penganugerahan gelar Pahlawan Nasional (SK Presiden No. 087/TK/1973) dan penggunaan namanya sebagai identitas institusional, termasuk nama lapangan, kapal perang TNI AL (KRI Teuku Umar 385), dan pendirian Universitas Teuku Umar. (Burhanuddin, 2024)

c. Cut Nyak Dien

Cut Nyak Dien merupakan salah satu figur sentral perlawanan wanita dalam sejarah Perang Aceh. Perannya bermula pasca gugurnya suami pertama beliau, Teuku Ibrahim Lamnga, yang memicu sumpah untuk terus berjuang, (Midadi, 2025) serta pernikahannya dengan Teuku Umar yang kemudian menjadi simpul kekuatan baru perlawanan. Meskipun mengalami serangkaian kemunduran setelah gugurnya Teuku Umar pada tahun 1899 M, beliau meneruskan perjuangan dengan menerapkan taktik perang gerilya selama hampir satu dekade di pedalaman Aceh. Perjuangan gigih ini memberikan dampak signifikan pada dimensi sosial budaya dan politik di Aceh, memelihara semangat perlawanan rakyat, dan memberikan inspirasi kepahlawanan yang mendalam, meskipun beliau akhirnya ditangkap pada tahun 1906 M dan diasingkan hingga wafat di Sumedang pada tahun 1908 M. (Soraya et al., 2024)

d. Teungku Fakinah

Selain Cut Nyak Dien, ada beberapa tokoh perempuan yang terkenal keberaniannya dalam Perang Aceh, salah satunya Teungku Fakinah. Peran sentral beliau dalam konflik tersebut terbukti dari jabatannya sebagai Panglima Perang dalam menghadapi agresi kolonial Belanda. Secara militer, Teungku Fakinah bertanggung jawab memimpin empat *Kuta* (benteng pertahanan) yang strategis di wilayah Lam Krak, termasuk Kuta Cot Weue yang berada di bawah komando langsung beliau. Kontribusi signifikan beliau juga terlihat dalam inisiasi pembangunan sebuah basis pertahanan yang secara khusus dikenal sebagai Sukey Fakinah atau Kuta Pertahanan Wanita, yang lebih populer disebut *Inong Balee* (Janda Pemberani). Struktur ini berfungsi vital sebagai pusat koordinasi para pejuang untuk merumuskan strategi perlawanan. Selain peran militernya, Teungku Fakinah juga memanfaatkan dimensi keagamaan dan sosial sebagai basis perjuangan. Beliau mendirikan Masjid Tengku Fakinah sekitar tahun 1915 M, yang bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga berfungsi ganda sebagai institusi komunal yang penting. Masjid ini menjadi lokasi diselenggarakannya majelis taklim, pertemuan untuk musyawarah, serta forum konsultasi untuk merancang strategi perjuangan melawan Belanda. (Uyuni, 2023)

KESIMPULAN

Perang Aceh secara fundamental dipahami sebagai sebuah manifestasi pertahanan kedaulatan yang dipicu oleh perubahan tatanan geopolitik regional. Titik kritisnya adalah Traktat Sumatera tahun 1871 M, yang secara unilateral menghapus klausul jaminan kemerdekaan Aceh dalam Traktat London (1824 M). Perjanjian ini memberikan legitimasi diplomatik bagi Belanda untuk mengintegrasikan seluruh Sumatera. Meskipun

demikian, pemicu esensial yang menggerakkan totalitas perlawanan rakyat adalah tekad yang tidak dapat ditawar untuk mempertahankan kedaulatan politik dan esensi nilai-nilai keislaman dari hegemoni non-Muslim. Secara ideologis, strategi perlawanan Aceh dikonseptualisasikan sebagai Perang Sabil (Jihad), sebuah kewajiban suci yang memberikan dimensi teologis dan spiritual yang kuat kepada para pejuang. Efektivitas mobilisasi massa didukung secara krusial oleh peran sentral ulama yang mengeluarkan fatwa jihad dan memanfaatkan instrumen naratif seperti Hikayat Prang Sabi untuk menanamkan keyakinan syahid, yang berhasil mengubah ketakutan akan kematian menjadi aspirasi spiritual.

Secara operasional-militer, taktik utama adalah implementasi perang gerilya desentralistik. Taktik ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat (Perang Rakyat) dan dikomandoi oleh kepemimpinan lokal yang otonom, sehingga berhasil memfragmentasi serta melemahkan logistik dan moral pasukan kolonial yang terpusat. Kontinuitas perlawanan yang gigih ini sangat bergantung pada suksesi pemimpin karismatik, termasuk Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman sebagai sentrum ideologis Perang Sabil. Selain itu, ada Teuku Umar yang menerapkan siasat "berpura-pura bekerjasama" sebagai taktik infiltrasi cerdik untuk mengakuisisi logistik dari pihak Belanda, serta tokoh-tokoh perempuan ikonik seperti Cut Nyak Dien dan Teungku Fakinah. Teungku Fakinah khususnya, menunjukkan integrasi peran yang unik, menggabungkan kepemimpinan militer (sebagai Panglima Perang yang memimpin Kuta dan membentuk basis pertahanan Inong Balee) dengan peran keagamaan dan sosial, yakni menjadikan Masjid Tengku Fakinah sebagai institusi komunal dan forum konsultasi strategis perlawanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, I. (n.d.). *Perang di Jalan Allah*. Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Burhanuddin, B. (2024). Peranan Teuku Umar dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1873-1899. *Journal on Teacher Education*, 5(3), 236–243. <https://doi.org/10.31004/jote.v5i3.23559>
- Hadi, A. (2010). *Aceh: Sejarah, budaya, dan tradisi* (Edisi Pertama). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hajar, I. I., Said, I. G., & Maram, A. N. (2025). *RESISTING COLONIALISM AND THE FORMATION OF ISLAMIC IDENTITY IN NUSANTARA-INDONESIA*. 49(2).
- Kulu, T. P. (1983). *HIKAYAT PRANG SABI*.
- Midadi, O. (2025). *PERAN ULAMA DALAM PERGERAKAN NASIONAL DI ACEH : STUDI KASUS PERANG ACEH TAHUN 1873-1912*. 5(1).
- Ningsih, W. L., & Nailufar, N. N. (2021, July 6). Traktat London: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/06/111643379/traktat-london-latar-belakang-isi-dan-dampaknya>

- Ridhwan, M., & Ibrahim, Y. (2022). WALI NANGGROE ACEH: PERUBAHAN BUDAYA DAN POLITIK ACEH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI). *JURNAL HURRIAH: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian*, 3(2), 91–101. <https://doi.org/10.56806/jh.v3i2.90>
- Siahaan, S., Hendra, A., & Midhio, I. W. (2021). STRATEGI PERANG SEMESTA DALAM PERANG ACEH (1873-1912). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2537–2548.
- Soraya, S. K., Samingan, & Roe, Y. T. (2024). CUT NYAK DIEN : RATU PERANG ACEH DALAM MELAWAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA TAHUN 1878-1908. *Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, 6(2). <https://doi.org/10.37478/sajaratun.v6i2.1475>
- Uyuni, B. (2023). Tengku Fakinah (D. 1933) Indonesia's Woman Ulama. *International Journal of Sustainable Applied Sciences (IJSAS)*, 1(1), 13–34.